PENGARUH KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN SUBANG

Oleh:
FADLI SETIA HERMANTO
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Fadli Setia Hermanto, "the influence of Coordination and Implementation Policy to Effectiveness of Employees Working in Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang, under the guidance of Oman Sukirman., SE., M.M.

Government efforts to govern all fields always requires integration and synchronization between processes of government work with the public interest in accordance with the needs and changes concentrated on efforts to realize good governance and effective. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang Regency is one of the local government agency that has the task of carrying out the duties and functions of governance organizational unit in the field of perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar in kabupaten subang. This study aims to demonstrate how the influence of the Coordination and Implementation Policy to Effectiveness of Employees Working in Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

This research method using descriptive method with the verifikatif approach. The Unit of analysis in this study is of Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang total of 117 people as the population. Sample in the research amounted to 54 people were taken through sampling techniques. Data analysis using the method of Linear regression multiple with the help of spss 21 for windows.

Result of the study concluded that coordination and implementation policy contributed to the effectiveness of employees working. Further results of analysis of linear regression multiple concluded that coordination and implementation policy influence significantly to the effectiveness of employees working, influential either partially or simultaneous.

Keywords : coordination, implementation policy, effectiveness of employees working

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terkait dengan pemerintahan saat ini, tatanan organisasi pemerintah negara merupakan sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. tatanan organisasi pemerintahan pada suatu negara dipengaruhi oleh bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut berupa falsafah, cita-cita dan tujuan bernegara serta perkembangan lingkungan strategjik yang dihadapi baik dalam tatanan nasional maupun internasional. usaha pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan disegala bidang senantiasa memerlukan keterpaduan dan sinkronisasi antara proses kerja pemerintah dengan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi pada upaya untuk mengwujudkan pemerintahan yang baik (Good

Government) dan efektif, sehingga penting dilakukan berbagai upaya dan peningkatan kemampuan kinerja pegawai pemerintah dalam rangka keberhasilan untuk mengwujudkan suatu lembaga pemerintahan yang berwibawa, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema good govermance dengan segala prinsip dasarnya.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi kepemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Subang.

Setiap proses administrasi pemerintahan, sangatlah penting arti dari koordinasi. pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar dengan berbagai unsur yang terlihat di dalamnya. salah satunya adalah pegawai yang merupakan aparatur pemerintah yang harus bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan seluruh aparat atau bagian yang ada di dalamnya atau pihak-pihak lain yang terkait perlu mengadakan koordinasi dan hubungan kerja.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar hanya mengenai mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Setiap disiplin ilmu memberi sumbangan dengan satu dan lain cara untuk membantu para pimpinan/manajer membuat organisasinya agar lebih efektif. Efektivitas merupakan landasan dari setiap organisasi dalam pencapaian suatu tujuan organisasi, karena apabila suatu intansi dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan efektif dan efesien, maka intansi tersebut sudah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang handal dan terampil. efektivitas seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam setiap suasana sosial, tidak hanya pada aktivitasnya sendiri tetapi juga bagaimana hubungan aktivitas itu dengan yang sedang dilakukan orang lain.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Koordinasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang.
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang.
3. Bagaimana Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

4. Seberapa besar pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang.
5. Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang.
6. Seberapa besar pengaruh Koordinasi dan Implementasi Kebijakan secara simultan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Koordinasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengeloaan Pasar Kabupaten Subang.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Koordinasi dan Implementasi Kebijakan secara simultan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/ teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Handayaningrat, 2002:54)

Siagian (2001:05-22) menyatakan, bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang menyatukan berbagai kegiatan yang saling berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan. Sasaran utama koordinasi adalah untuk menciptakan “unity action” yang pada gilirannya akan menjamin keterpaduan pelaksanaan dan sekaligus meningkatkan efesiensi, efektivitas dan produktivitas kerjasama komponen yang terlibat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan eksekutif. (Widodo, 2010:95).

Nugroho (2008:43) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua pilihan, yakni langsung melaksanakannya dalam bentuk program atau formulasi kebijakan derivate atau turunan.

Efektivitas Kerja

Efektivitas kerja adalah pengukuran dalam arti bahwa sejauhmana organisasi melaksanakan tugas atau mencapai tugas semua sasarannya di lihat dari jumlah kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan hasil yang telah ditentukan (Steers , 2001:46)

Efektivitas kerja menurut Siagian (2001:151) yang menyatakan bahwa: “Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditentukan sebelumnya, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung bilamana tugas

tersebut diselesaikan dan tidak terutama cara melaksanakannya dan beberapa biaya yang diselesaikan untuk itu.

Hubungan Antara Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja

Syafrudin (2003:121) bahwa koordinasi memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja yaitu melalui kesempatan yang diberikan oleh pemimpin kepada para pegawai untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya merupakan unsur yang membentuk kinerja (performance) pegawai yang pada akhirnya dapat menunjukan efektivitas kerja di dalam organisasi.

Hubungan Antara Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja

Menurut Widodo (2010:105) bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas kerja yaitu dengan implementasi kebijakan yang efektif melalui sumber-sumber dapat merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan tersebut meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan asal-usul dia atas guna melaksanakan pelayanan sehingga dapat menunjukan efektivitas kerja.

Hubungan Antara Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fathoni (2006:109) dengan judul "Analisis Pengaruh Koordinasi dan Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja" menyatakan bahwa Koordinasi dan Implementasi Kebijakan berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Kerja.

HIPOTESIS

Berdasarkan landasan pemikiran teoritis dan kerangka pemikiran, maka penulis berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini bahwa :

1. Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.
2. Implementasi Kebijakan berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.
3. Koordinasi dan Implementasi Kebijakan berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Kerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Menurut Husein Umar (2008:303) dalam bukunya menerangkan bahwa: "Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu". Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh koordinasi dan implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja pegawai pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang.

Objek penelitian yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi dan yang mengakibatkan variabel terikat (Variabel Dependent). Adapun variabel bebas yang digunakan peneliti adalah variabel Koordinasi (X1) dan variabel Implementasi Kebijakan (X2).

2. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat yang digunakan peneliti adalah Efektivitas Kerja (Y).

Penelitian dilakukan pada Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2009:2) ”Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif”
Metode Deskriptif menurut Sugiyono (2009:206) “Penelitian yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”.

Adapun dalam penelitian ini analisis deskriptif dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan yang sesuai rumusan masalah pada point pertama sampai ketiga yaitu:
1. Deskriptif Koordinasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.
2. Deskriptif Implementasi Kebijakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang
3. Deskriptif Efektivitas Kerja pada pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

Pendekatan verifikatif menurut Sugiyono (2005 :21) adalah :
“metode verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.

Metode verifikatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai dan besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada pegawai di Disperindagsar Kab. Subang serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

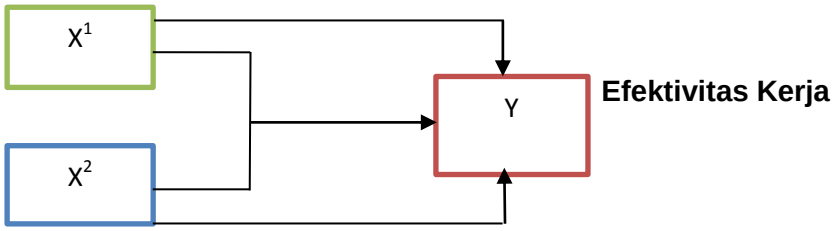
1. Mencari dan menetapkan fenomena yang terjadi pada pegawai di dinas perindagsar kab. subang selanjutnya menetapkan judul penelitian.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada pegawai di dinas perindagsar kab. subang.
3. Merumuskan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan dan hipotesis untuk diuji. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Koordinasi (variabel X1) dan Implementasi Kebijakan (variabel X2) serta Efektivitas Kerja Pegawai(variabel Y).
4. Menetapkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pegawai di dinas Perindagsar kab. subang

5. Menetapkan hipotesis penelitian sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Dinas Perindagsar Kab. Subang berdasarkan teori.
6. Memilih serta memberi definisi terhadap setiap pengeluaran variabel. Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran dengan skala ordinal karena data yang diukurnya berupa tingkatan. Pada skala ini, urutan simbol atau kode berupa angka yang mempunyai arti urutan jenjang yang dimulai dari yang positif sampai yang paling negatif dan sebaliknya.
7. Menetapkan data-data mengenai Koordiansi dan Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Perindagsar Kab. Subang
8. Melakukan analisis mengenai informasi tentang Koordiansi dan Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Perindagsar Kab. Subang
9. Menyimpulkan penelitian, sehingga akan diperoleh penjelasan dan jawaban atas identifikasi masalah dalam penelitian.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma hubungan antara dua variabel bebas secara bersamaan yang mempunyai hubungan dengan satu variabel tergantung.

Desain penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Koordinasi



Implementasi Kebijakan

Operasionalisasi Variabel

Operasionalsasi variabel dimaksudkan untuk memperjelas variabel-variabel yang diteliti beserta pengukuran-pengukurannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu :

1. Variabel bebas *(Independent Variable)*

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat), Sugiyono (2009:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Koordinasi dan Implementasi Kebijakan.

2. Variabel Terikat *(Dependent Variable)*

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2009:59).Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *Dependent* (terikat) Efektivitas Kerja.

Untuk lebih jelasnya, operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Operasional Variabel Koordinasi

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	No Item	Sumber Data
Koordinasi (Variabel X^1)	Koordinasi adalah suatu kegiatan yang multidimensia dari berbagai tahapan atau langkah sesuai dengan tujuan dari suatu organisasi, sehingga tindakan yang telah direncanakan merupakan kesatuan perintah dari pelimpahan wewenang sesuai dengan pembagian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh organisasi. (Nitisemito, 2002:14)	Koordinasi Perencanaan	• Penetapan Tujuan • Penetapan Rencana Tindak • Penetapan Lokasi	**ORDINAL**	1-3	Bagian Kepegawaian Dinas Perindagsar Kab. Subang
		Koordinasi Pengorganisasian	• Struktur Organisasi • Kesatuan Perintah • Pembagian Kerja • Pendelegasian Wewenang		4-7	
		Koordinasi Penggerakan	• Komunikasi • Motiviasi • Kepemimpinan • Pengambilan Keputusan		8-11	
		Koordinasi Pengendalian	• Penetapan Standar • Pengukuran • Koreksi Tindak		12-14	

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	No Item	Sumber Data
Implementasi Kebijakan (Variabe	Adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,	Komunikasi	• Kejelasan • Konsitensi • Tranmisi	**ORDIN**	15-17	

l X^2)	biasanya dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan eksekutif **(Widodo, 2010:95)**	Sumber Daya	• Pelaksana • Wewenang • Fasilitas	**A L**	18-21	Bagian Kepegawaian Dinas Perindagsar Kab. Subang
		Disposisi	• Penerimaan terhadap kebijakan • Pengetahuan yang cukup		22-23	
		Struktur Birokrasi	• Adanya standar operasi • Fragmentasi		24-25	

Tabel 3.4
Operasionalisasi Variabel Efektivitas Kerja

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	No Item	Sumber Data
Efektivitas Kerja Pegawai (Variabel Y)	Adalah pengukuran dalam arti bahwa sejauhmana organisasi melaksanakan tugas atau mencapai tugas semua sasarannya dilihat dari jumlah kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan hasil yang telah ditentukan **(Steers, 2001:46)**	Ketepatan Kualitas	• Sesuai Standar Kerja • Tepat Pengguna • Sesuai Aturan	**O R D I N A L**	26-28	Bagian Kepegawaian Dinas Perindagsar Kab. Subang
		Ketepatan Kuantitas	• Sesuai Target • Memenuhi Kebutuhan • Sesuai Anggaran		29-31	
		Ketepatan Waktu	• Sesuai Prosedur • Sesuai Jadwal • Sesuai Perjanjian		32-33	

Teknik Penentuan Data

1. Populasi

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data sekunder, jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Menurut Sugiyono (2009:137) sumber data sekunder adalah sumber yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder eksternal yang terdapat di Dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang. Data sekunder eksternal adalah data sekunder yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data variabel koordinasi dan implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang.

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang sebanyak 117 orang.

2. Sampel

Menurut **Sugiyono (2009:116)**, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang di ambil dalam penelitian dilakukan dengan teknik *probability sampling* dengan jenis *propotionate stratified random sampling* (sampel acak berstrata).

Menurut **Sugiyono (2009;118)**, *propotionate stratified random sampling* yaitu ”teknik pengambilan sampel bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara poporsional”.

Adapun yang menjadi sampel yang digunakan untuk pengukuran kuesioner adalah konsumen pada minimarket Alfamart Kota bandung. Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel (n). **Husein Umar (2004;78)** untuk menentukan sampel digunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber : Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati (2010:38)

Ket :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan dalam penelitian 10% atau 0,1

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan berikut :

$$n = \frac{117}{1 + 117(0{,}1)^2}$$

= 53.917

Dengan menggunakan rumus diatas bahwa dengan populasi sebanyak 117 orang, tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 10% maka dapat diketahui sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 54 orang pegawai.

Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada intansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer (data yang di peroleh langsung dari Dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang).

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung terhadap obyek yang diteliti, seperti :

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan proses keterangan atau data yang diperlukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pimpinan pegawai serta pegawai yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diteliti, di lingkungan dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang.

b. Angket *(Kuesioner)*

Kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab, berupa daftar pertanyaan yang dibuat dengan metode pertanyaan terstruktur (tertutup dan terbuka) kepada responden tentang variabel Koordinasi dan Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

c. Pengamatan *(Observasi)*

Dengan mengadakan penelitian dan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dan keadaan dialokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi mengenai subyek penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Dokumentasi*)

Teknik pengumpulan data sekunder (yang dilakukan dengan mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan variabel penelitian). Penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai buku, jurnal, catatan-catatan, gambar-gambar dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan dari metodologi ini adalah untuk deskripsi, gambaran secara sistematis akurat, faktual mengenai hal-hal yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai data penelitian. Sebelum kuesioner atau instrument penelitian disebarkan kepada responden terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya alat ukur yang digunakan, sedangkan pengujian reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya.

Uji Validitas

Menurut **Sugiyono (2008:3)** valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti". Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur disebut valid bila dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Seperti yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total = 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan apabila < 0,30 berarti data tersebut dapat dikatakan tidak valid. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan rumus korelasi pearson (r). Seperti dilakukan pengujian lebih lanjut, semua item pernyataan dalam kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Uji validitas dilakukan untuk mengukur

pernyataan yang ada dalam kuesioner. Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi pearson product moment. Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan software SPSS 21.0 for windows dengan metode korelasi pearson product moment yang rumusnya sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Sumber: Sugiyono (2008:248)

Keterangan:

r = Koefisien korelasi pearson product moment

X = Koordinasi dan Implementasi Kebijakan

Y = Efektivitas Kerja Pegawai

n = Ukuran sampel atau banyak data di dalam sampel.

Taraf signifikansi ditentukan 5%. Jika diperoleh hasil korelasi yang lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05 berarti butir pertanyaan tersebut valid.

Uji Realiabilitas

Pengujian terhadap tingkat reliabilitas atau keandalan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan dan mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya. Reliabilitas adalah pengujian yang diperlukan untuk mengetahui ketentuan dan tingkat resisi suatu ukuran tersebut dapat diandalkan dalam arti pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa.

Untuk menguji reliabilitas (keandalan) kuesioner dalam penelitian ini digunakan teknik belah dua (*split half*) skor pernyataan (*statement*) bernomor ganjil genap, dengan teknik korelasi *spearman brown*. Cara kerja Teknik Belah Dua (*split half method*) menurut Sugiyono (2006:126), adalah sebagai berikut:

1. Buti-butir instrumen di belah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan genap.
2. Skor data tiap kelompok disusun sendiri. Skor butir kelompok dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total.
3. Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan genap di cari korelasinya.
4. Koefisien korelasi selanjutnya dimasukan dalam rumus *Spearman Brown.*"

Adapun rumus untuk menghitung angka reliabilitas yaitu sebagai berikut:

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Sumber: Sugiyono (2009)

Keterangan:

r_i = Koefisien reliabilitas *Spearman Brown*

r_b = Koefisien korelasi antara belahan pertama (genap) dan kedua (ganjil).

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak beberda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atas jawaban sementara mengenai sesuatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris, untuk mengetahui apakah pernyataan itu dapat diterima atau tidak. Dalam penelitian ini yang akan diuji setaiap hipotesis yang telah diajukan pada bab sebelumnya, secara deskriftif dan verifikatif.
Dalam penelitian ini hipotesis deskriftif yang diajukan sebagai berikut

H1 : Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.
Dimana penelitian ini hipotesis deskriptif sebagai berikut:

$H_{01} : \rho = 0$ Koordinasi tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

$H_{11} : \rho \neq 0$ Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

H2 : Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

$H_{02}: \rho = 0$ Implementasi Kebijakan tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

$H_{12}: \rho \neq 0$: Implementasi Kebijakan berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

H3 : Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.
Dimana :

$H_{03}: \rho = 0$ Koordinasi dan Implementasi Kebijakan tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

$H_1: \rho \neq 0$ Koordinasi dan Implementasi Kebijakan berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

Pengujian hipotesis verifikatif yang akan diuji dalam penelitian ini adalah seberapa besar Koordinasi dan Implementasi Kebijakan tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja, dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi. Langkah – langkah dalam analisisnya sebagai berikut:

1. Pengujian Secara Simultan/Total.

Melakukan uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

a. Rumus uji F yang digunakan adalah :

$$F = \frac{(n-k-1)R^2_{Y.X.....}}{k(1-R^2_{Y.X.....})}$$

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable bebas secara bersama-sama dapat berperan atas variable terikat. Pengujian ini dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan anatara nilai F_{kritis} dengan nilai F_{test} yang terdapat pada Tabel *Analisis of Variance* (ANOVA) dari hasil perhitungan dengan *micro-soft.* Jika nilai $F_{hitung} > F_{kritis}$, maka H_0 yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variabel terikat (koordinasi dan implementasi kebijakan) ditolak dan sebaliknya.

Menurut Sudjana (2001 : 369) perhitungan terhadap titik keeratan dan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah menggunakan uji korelasi. Kemudian dilakukan perhitungan terhadap koefisien yang disebut juga koefisien korelasi produk moment (*Pearson).*

b. Hipotesis

H6 : Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Berpengaruh Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

H_{06}: $\beta = 0$ Koordinasi dan Implementasi Kebijakan secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

H_{16}: $\beta \neq 0$ Koordinasi dan Implementasi Kebijakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

Kriteria pengujian

H_0 ditolak apabila F_{hitung} > dari F_{tabel} ($\alpha = 0,05$)

Menurut Guilford (1956:480), bahwa tafsiran koefisien korelasi variabel dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Kategori Korelasi Metode Guilford

Besarnya Pengaruh	Bentuk Hubungan
0,00 – 0,20	Sangat longgar,dapat diabaikan

0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Moderat / Cukup
0,61 – 0,80	Erat
0,81 – 1,00	Sangat erat

Apabila pada pengujian secara simultan H_0 ditolak, artinya sekurang-kurangnya ada sebuah $\rho yxi \neq 0$. Untuk mengetahui ρyxi yang tidak sama dengan nol , maka dilakukan pengujian secara parsial.

2. Pengujian Secara Parsial

Melakukan uji-t, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat hipotesis sebagai berikut :

A. Rumus uji t yang digunakan adalah :

$$t_i = \frac{P_{YX1}}{\sqrt{\frac{(1-R^2_{XY.....Xk})CRii}{(n-k-1)}}} \quad I = 1,2,3.....,5$$

Hasilnya dibandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 5%.

Hipotesis

H4 : Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

H_{04} ; β = 0, Koordinasi tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

H_{14} ; β ≠ 0, Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

H5 : Implementasi Kebijakan berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

Dimana :

H_{05} ; β = 0, Implementasi Kebijakan tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

H_{15} ; β ≠ 0, Implementasi Kebijakan berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan IBM SPSS Statistics 21 nilai F_{hitung} pengaruh koordinasi dan implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja sebagai berikut :

Uji Anova untuk uji pengaruh koordinasi dan implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja

ANOVA[a]

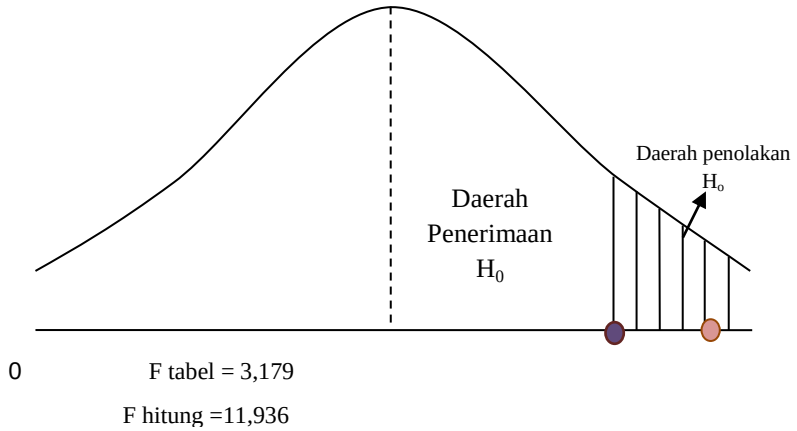
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	290,711	2	145,356	11,936	,000[b]
	Residual	621,057	51	12,178		
	Total	911,768	53			

a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja (Y)

b. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan (X2), Koordinasi (X1)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,936 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel dimana pada tabel F untuk α = 0,05 dan df_1: 2 dan df_2: n-k-1 (54-2-1) = 51, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,179. Karena F_{hitung} (11,936) lebih besar dibanding F_{tabel} (3,179) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0,05) diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa koordinasidanimplementasi kebijakansecara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.hal ini didukung oleh Fathoni (2006) menyatakan bahwa koordinasi dan implementasi kebijakan berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas kerja.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_0 pada uji simultan sebagai berikut:



Gambar 4.4
Grafik Penolakan dan Penerimaan H_0 Pada Uji Simultan Terhadap Efektivitas Kerja

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Koordinasi dan Implementasi Kebijkan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang, dengan indikator koordinasi perencanaan, koordinasi pengorganisasian, koordinasi penggerakan dan koordinasi pengendalian berada dalam kategori baik.
2. Implementasi kebijakan pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang, dengan indikator sumber daya dan struktur birokrasi berada dalam kategori baik sedangkan dalam kategori cukup terdapat pada komunikasi dan disposisi.
3. Efektivitas kerja pegawai pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang, dengan indikator ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu berada dalam kategori baik.
4. Koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang yang berada dalam kategori sedang. sehingga koordinasi di abaikan karena koordinasi tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap efektivitas kerja pegawai di dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang..
5. Implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang yang berada dalam kategori sedang. sehingga implementasi kebijakan di abaikan karena implementasi kebijakan tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap efektivitas kerja pegawai pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang..
6. Pengaruh koordinasi dan implementasi kebijakan berada pada kategori kurang, dengan demikian koordinasi dan implementasi kebijakan memberikan kontribusi yang kurang dominan terhadap efektivitas kerja pegawai pada dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti ingin memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang, yaitu :

1. Koordinasi pada dinas disperindagsar kab.subang sudah dalam kategori baik. hal itu harus dapat dipertahankan dan alangkah baik untuk di tingkatkan lagi.
2. Implementasi Kebijakan pada dinas disperindagsar kab.subang sudah dalam kategori baik, akan tetapi dalam komunikasi dan disposisi masih cukup dan perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
3. Dari hasil penelitian,bahwa efektivitas kerja pada dinas disperindagsar kab.subang sudah dalam kategori baik. hal itu harus dipertahankan dan alangkah lebih baik untuk di tingkatkan lagi.
4. Dalam koordinasi perlu adanya kontribusi pegawai dalam pengambilan keputusan, dengan cara mengajak dan memberikan waktu kepada pegawai untuk berperan serta dalam memberikan saran dalam pengambilan keputusan. berdasarkan hasil

penelitian bahwa kontribusi pegawai dalam mewarnai pengambilan keputusan masih cukup.

5. Unsur implementasi kebijakan yang mempunyai nilai paling kecil adalah isi kebijakan belum di komunikasikan dengan benar kepada semua pihak yang terkait, dengan demikian kepala dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang perlu mengkomunikasikan dengan benar kepada semua pihak yang terkait
6. Unsur yang harus diperhatikan dari efektivitas kerja pegawai adalah penyelesaian pekerjaan harus sesuai dengan perjanjian, karena unsur ini memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan unsur lainnya, untuk itu kepala dinas perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten subang perlu memberikan motivasi kepada pegawai supaya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.